

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Identifikasi Wisata Religi

2.1.1 Definisi Pariwisata

Pariwisata merujuk pada suatu jenis kegiatan seorang yang memiliki sifat sementara guna menuju ke luar tempat untuk bekerja serta tempat yang ditinggali (Mathieson dan Wall, 1982). Sedangkan pengertian lain pariwisata adalah aktivitas yang berkaitan tentang suatu perekonomian yang berhubungan dengan aktivitas masuknya seseorang ke dalam suatu objek wisata di suatu daerah (Karyono (1997:15)). Definisi lain tentang pariwisata menggambarkan sebagai perjalanan yang dilakukan dari satu tempat ke tempat lain, yang bersifat sementara. Kegiatan ini dapat dilakukan oleh individu atau kelompok dengan tujuan mencapai harmoni dan kepuasan dalam dimensi sosial, budaya, lingkungan, dan ilmiah dari lingkungan tersebut (Kodhyat, 1998).

Pariwisata adalah masyarakat sekitar dan wisatawan yang memiliki hubungan karena adanya kegiatan (Soekadjo, 1996). Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 Pariwisata adalah susunan kegiatan wisata yang adanya dukungan berbagai aktivitas wisata serta berbagai fasilitas dan layanan yang telah disediakan. Menurut zakaria (2014) pariwisata adalah kegiatan manusia yang melakukan perjalanan yang tidak memiliki tujuan guna mencari nafkah. Sedangkan wisatawan merupakan pelaku yang melaksanakan perjalanan berwisata atau liburan ke suatu tempat tanpa menetap dan hanya dilakukan secara sementara waktu tempat yang dikunjungi (Purwanti & Dewi, 2014)

Pengembangan pariwisata merupakan strategi teknis, teoritis, konseptual, dan moral untuk membuat objek wisata menarik yang menjadikan pengunjung memiliki ketertarikan untuk mengunjunginya Abdul Majid (2014:24). Sedangkan menurut pendapat Soekadjo (2011), pariwisata merupakan usaha terkait bidang pariwisata yang berhubungan dengan suatu objek wisata. Undang-Undang RI No. 9 Tahun 1990, pariwisata merupakan sesuatu yang memiliki hubungan kegiatan perjalanan bersifat sementara guna menikmati objek daya tarik wisata seperti daya tarik dan pengusaha objek wisata serta usaha yang berhubungan dengan wisata.

Secara umum dapat diambil kesimpulan, pariwisata merujuk pada suatu perjalanan yang dilakukan oleh manusia dari tempat ke tempat tujuan sebagai kebutuhan kebahagiaan lingkungan hidup, dimensi sosial budaya, alam dan ilmu. Sedangkan wisata religi merupakan perpindahan yang dilakukan perseorangan atau berkelompok untuk mencari atau meningkatkan amalan suatu agama.

2.1.2 Jenis Pariwisata

Macam-macam jenis wisata yang dapat dinikmati oleh wisatawan. (yoeti, 1982: 111) dalam buku berjudul "Pengantar Ilmu Pariwisata" terdapat beberapa jenis-jenis pariwisata yaitu :

1. *Cultural tourism* (wisata budaya)

Wisata budaya merupakan daya tarik perjalanan perseorangan atau berkelompok dilihat dari seni budaya pada suatu tempat. Wisata budaya biasanya dilakukan dengan mengunjungi pertunjukan seni tari, seni musik, museum, tempat peninggalan nenek moyang bersejarah dan tempat antik peninggalan benda kuno. Wisata budaya bermanfaat guna memperkenalkan budaya sendiri ke negara lain (internasional) guna masyarakat luar mengetahui tentang kebudayaan yang kita miliki. Wisata budaya seperti ini mengalami tren yang meningkat banyak digemari di Indonesia seperti, wisatawan luar negeri yang datang ke Indonesia guna menikmati wisata budaya yang ada di Indonesia. Macam-macam kesenian dan kebudayaan di Indonesia yang dapat dinikmati wisatawan luar negeri seperti museum.

2. *Recreational tourism* (wisata kesehatan)

Wisata kesehatan merupakan perjalanan yang dilakukan sebagai penyembuhan penyakit. Wisatawan yang memiliki daya tarik pada wisata kesehatan untuk memelihara, mengelola dan meningkatkan kesehatan. Kegiatan dalam wisata kegiatan seperti spa pijat, yoga, perjalanan kuliner sehat.

3. *Sport tourism* (wisata olahraga)

Wisata olahraga adalah wisata yang dilakukan individu maupun kelompok yang dilakukan dengan tujuan untuk melihat dan menyaksikan kegiatan olahraga di suatu tempat seperti pesta olahraga, sepak bola, dan lain-lainnya.

4. *Political tourism* (wisata politik)

Wisata politik terjadi ketika seseorang mengunjungi suatu destinasi untuk mengamati suatu acara yang memiliki makna nasional, seperti hari libur nasional atau peringatan penting lainnya.

5. *Religion tourism* (wisata religi)

Menurut pendapat Spilane(1987) pariwisata memiliki enam jenis diantaranya

1. *Pleasure Tourism*

Suatu perjalanan wisata untuk menikmati perjalanan jenis pariwisata yang meninggalkan tempat tinggal untuk bersenang-senang, berlibur, menikmati keindahan dan lainnya

2. *Reaction Tourism*

Perjalanan suatu wisata yang memiliki tujuan untuk bereaksi. suatu perjalanan wisata untuk menikmati perjalanan jenis pariwisata yang meninggalkan tempat tinggal untuk bersenang-senang, berlibur, menikmati keindahan dan lainnya

3. *Culture Tourism*

Suatu perjalanan wisata untuk menikmati perjalan jenis pariwisata yang meninggalkan tempat tinggal untuk bersenang-senang, berlibur, menikmati keindahan dan lainnya

4. *Sporst Tourism*

Suatu perjalanan wisata untuk menikmati perjalan jenis pariwisata yang meninggalkan tempat tinggal untuk bersenang-senang, berlibur, menikmati keindahan dan lainnya

5. *Business Tourism*

Pariwisata ynag bertujuan untuk berbisnis. Dalam pariwisata ini ditekankan unsur kesempatan yang digunakan oleh wisatawan untuk memanjakan diri mengunjungi objek wisata

6. *Convention Tourism*

Pariwisata yang bertujuan untuk konveksi, banyak Negara yang tertarik dalam melakukan jconverntion tourism ini dengan berbagai macam hotel maupun bangunan- bangunan yang disediakan untuk wisatawan

Sedangkan menurut pendapat Dimuru (2023) mengungkapkan adanya berbagai jenis pariwisata diantaranya

1. Wisata budaya

Wisata budaya merupakan kegiatan berwisata yang memiliki tujuan untuk memperluas atau mengembangkan pandangan hidup seseorang dengan melakukan kunjungan kesuatu tempat guna untuk memperkaya atau mempelajari adat istiadat, budaya dan kehidupan disuatu tempat.

2. Wisata olahraga

Wisata olahraga mewujudkan perjalanan pelancong yang sedang melakukan perjalanan dengan maksud hanya untuk aktivitas fisik atau hanya menikmati kegiatan pesta olahraga disuatu daerah tertentu.

3. Wisata komersial

Wisata komersial ialah suatu perjalanan yang memiliki tujuan untuk menikmati sebuah pameran yang bersifat komersil seperti pameran *industry*.

4. Wisata industri

Wisata *industry* merujuk pada suatu perjalanan wisata yang dilakukan wisatawan untuk mengunjungi wisata di bidang industri guna melakukan penelitian atau peninjauan

5. Wiasata bahari

Wisata bahari ialah aktivitas rekreasi yang mencakup laut, pantai, danau, dan sungai.

6. Wisata cagar alam

Wisata cagar alam merujuk pada jenis objek wisata yang berkaitan tentang suatu kawasan suaka alam yang memiliki tanaman, satwa dan karakter ekosistemnya yang keberlanjutan hidup dilindungi oleh hukum.

Kesimpulan yang dapat diambil dari beberapa pendapat adanya beberapa jenis pariwisata. Jenis pariwisata yaitu *Cultural tourism* (wisata budaya), *Recreational tourism* (wisata kesehatan), *Sport tourism* (wisata olahraga), *Political tourism* (wisata politik), *Religion tourism* (wisata religi)

2.1.3 Komponen Pariwisata

Pariwisata merupakan proses aktivitas seseorang atau kelompok yang melakukan perjalanan dan berdiam di tempat selain rumahnya dalam waktu kurang dari satu tahun guna berlibur, berobat dan lainnya. Pendapat Hadiwijoyo (2012:69) hal penting dalam komponen pariwisata yaitu *Attraction* dan *Accommodation*. *Attraction* yang merupakan daya tarik dari objek wisata yang menimbulkan rasa pengunjung ke tempat objek wisata. Sedangkan *accommodation* sebagai penginapan dengan konsep tempat hunian penduduk. (Nuryati, 1993: 1-2).

Menurut Stange et., al (2015), komponen pariwisata adalah 3A, yakni *attraction*, *activity*, dan *accessibility*. *Attraction* dengan definisi ketertarikan seseorang atau kelompok untuk mengunjungi suatu destinasi wisata. Komponen *activity* yang di maksud yaitu kegiatan yang dapat dilakukan pada suatu wisata oleh pengunjung yang memberikan perasaan baru. Sediaan pariwisata merujuk pada segala sesuatu yang disuguhkan kepada pengunjung seperti akomodasi, infrastruktur, atraksi, dan fasilitas pendukung (Zakaria et., al 2014). Teori dalam buku yang berjudul *Tourism Destination Management* berasal dari Buhalis (2008) mengemukakan terdapat 6a adanya penambahan *ancillary services*.

Komponen pariwisata, pada objek ini hanya mengambil 5a dari hasil identifikasi antara *attraction*, *accessibility*, *amenity*, *accommodation*, *activities* yang memiliki kemampuan untuk dijadikan sebagai bentuk pemecahan terhadap masalah yang ada di destinasi wisata selaku aspek kemajuan perekonomian (Sunaryo, 2013). Adapun berikut ini ialah dimensi komponen pariwisata

- 1) *Attraction* (atraksi) ialah suatu hal daya tarik pada suatu destinasi wisata. Adapun menurut Saryono (1997), atraksi tarik wisata merujuk pada unsur-unsur yang dapat diperhatikan dan dialami oleh wisatawan di suatu lokasi. Daya tarik destinasi mencakup keindahan alam, keunikan, budaya lokal, dan fasilitas buatan seperti taman rekreasi dan tempat hiburan.
- 2) *Accessibility* (aksesibilitas) berpendapat aksesibilitas ialah pendukung dan angkutan yang mempersingkat pengunjung menjadikan rasa nyaman guna mengunjungi suatu destinasi (Sunaryo, 2013)
- 3) *Amenity* (amenitas) dibutuhkan fasilitas akomodasi berbentuk seperti Hotel/penginapan, tersedianya rumah makan, tersedianya gazebo, warung, parkir, toilet umum, jasa angkutan umum, jasa komunikasi, dan jasa pemandu. (Warang et al., 2013)

4) *Accommodation* pendapat (Hadiwijoyo, 2012:68) akomodasi dalam wisata sebagai tempat hunian milik penduduk setempat guna mendukung adanya kegiatan wisata di objek wisata. Akomodasi dapat berupa *homestay*, villa, hotel, atay bumi perkemahan.

5) *Activities* (aktifitas)

Warang et al. (2013) memaparkan hubungan kegiatan objek wisata bagi pengunjung yang akan mendapat pengalaman. Aktivitas wisata salah satu hal penting yang menjadi daya tarik pengunjung objek wisata. (Stange, 2015)

Tabel II. 1 Komponen Pariwisata

No.	Variabel	Indikator
1.	Attraction (atraksi)	Ziarah Situs Makam dan berdoa
2.	Accesibility	Akses jalan, kelancaran transportasi, tempat informasi, petunjuk arah lokasi
3.	Amenity	Toko cendra mata, pelataran parkir, kamar kecil, rumah ibadah, bak sampah
4.	Accommodation	Tempat bermalam, kenyamanan penginapan, kebersihan tempat, fasilitas penunjang, harga
5.	Activities (aktivitas)	Arena wisata

Sumber : (zakaria & suprihardjo, 2014)

2.1.4 Dampak Perkembangan Wisata

Dampak yakni pengaruh sesuatu yang menjadi akibat secara positif maupun negatif. Pendapat Tindaon (2015), suatu pengaruh ditimbulkan adanya kegiatan pariwisata terhadap masyarakat serta lingkungan sekitar. Dampak adanya kegiatan pariwisata yaitu dampak sosial, ekonomi, dan lingkungan, (Rahman, 2014).

Sektor wisata daerah wajib berlandaskan perencanaan, pengembangan dan arah pengelolaan guna potensi yang ada di suatu daerah (Fyka et. al., 2018). Munawir (2017) mengemukakan dampak adalah suatu hal yang terjadi adanya aktivitas secara ilmiah, kimia, fisika atau biologi oleh manusia yang menjadikan perubahan.

Gayatri (2005) mengemukakan dampak pariwisata bagi masyarakat maupun daerah objek wisata terdiri atas sosial ekonomi, sosial budaya dan lingkungan. Dampak terhadap masyarakat dan lingkungan diantaranya:

a. Dampak wisata terhadap ekonomi

Menurut Spillane (1993), mesin penggerak ekonomi pada suatu daerah ialah sektor pariwisata yang memiliki pengaruh negatif dan positif terhadap perekonomian. Adapun, adanya dampak positif pariwisata terhadap perekonomian diantaranya pendapatan pemerintah dengan adanya kontribusi langsung melalui pajak dari para wisata, retribusi yang berasal dari pariwisata meningkat, peluang kesempatan pekerjaan adanya aktivitas

perkembangan pariwisata akan menciptakan atau peluang usaha maupun lapangan pekerjaan kepada masyarakat seperti tempat bermalam, warung dan lain-lain, efek aktivitas pariwisata akan mendorong pemerintah melakukan pembangunan guna memenuhi kebutuhan bidang pariwisata maupun masyarakat sekitar agar merasa nyaman mengunjungi tempat wisata tersebut, perkembangan ekonomi lokal terhadap pendapatan masyarakat, tempat wisata sekitar tempat wisata menjadi berkembang yang menjadikan tingkat pendapatan berkembang. Masyarakat sekitar mengoptimalkan aktivitas wisata untuk berjualan pada sekitar objek wisata dapat memenuhi kebutuhan masyarakat dalam seharinya.

Dampak negatif pariwisata dalam perekonomian yaitu ketergantungan tingkat pendapatan. Wilayah yang menggantungkan suatu objek wisata tertentu berpotensi menjadikan wilayah bertumpu pada objek wisata akan berpotensi resiko tinggi dan permasalahan penurunan pendapatan apabila wisata waktu sepi pengunjung.

Menurut pendapat lain yang diungkapkan oleh Kurniawan (2015), dampak pariwisata terhadap kondisi ekonomi masyarakat lokal dapat dikategorikan ke dalam delapan bidang utama. Bidang-bidang tersebut meliputi pendapatan valuta asing, pendapatan masyarakat, prospek perusahaan atau lapangan kerja, distribusi keuntungan saat ini, kepemilikan dan pengendalian, pengembangan infrastruktur, dan pendapatan regional.

Menurut Paramitasari (2010), pariwisata memberikan suatu dampak terhadap ekonomi, adapun dampak dari pariwisata terhadap ekonomi dengan dampak positif dan negatif. Dampak negatif pariwisata terhadap perekonomian yaitu mempertinggi biaya pembangunan, harga barang lokal maupun bahan pokok, dan pendapatan masyarakat tidak stabil. Untuk efek bagus pariwisata terhadap perekonomian menambah lapangan pekerjaan, menambah laba masyarakat, meningkatkan nilai mata uang Indonesia, meningkatkan keahlian dan keterampilan masyarakat mengacu kegiatan ekonomi lain.

b. Dampak wisata terhadap sosial budaya

Dampak wisata terhadap sosial pada dasarnya merupakan akibat interaksi sosial wisatawan dengan masyarakat sekitar wisata. Suwena dan Widyatmaja (2017) menegaskan bahwa pariwisata memiliki berbagai dampak terhadap masyarakat dan budaya, mencakup dampak positif maupun negatif. Salah satu dampak positifnya adalah kesenangan yang dirasakan wisatawan terhadap seni. Hal ini memotivasi masyarakat lokal untuk mengembangkan apresiasi yang mendalam terhadap tari dan seni budaya mereka sendiri, yang pada akhirnya menumbuhkan kebanggaan terhadap produk-produk lokal. Interaksi antara dua peradaban yang berbeda akan memberikan potensi kepada wisatawan untuk dapat memahami budaya lokal, sehingga menumbuhkan apresiasi dan rasa hormat terhadap budaya yang beragam. Sementara itu, modifikasi tari religius yang semula hanya diperuntukkan untuk tempat suci namun dipamerkan kepada pengunjung, serta pengabaian

nilai artistik kerajinan tangan untuk memenuhi permintaan pasar, merupakan contoh dampak negatif. Peletakan simbol agama tidak seharusnya dengan tujuan memperoleh daya tarik.

Menurut John (1988) dampak sosial dari pariwisata meliputi berbagai aspek perubahan sosial, moral/perilaku, bahasa, kesehatan dan agama. Di bawah ini adalah bagan dampak sosial dari pariwisata

1. Perubahan sosial

Pariwisata memicu perubahan gaya hidup dengan menciptakan peluang kerja dan menghasilkan pendapatan yang memadai bagi penduduk lokal. Orang-orang yang terlibat langsung dalam aktivitas pariwisata akan mengalokasikan sebagian besar waktunya untuk kegiatan tersebut, sehingga waktu yang dihabiskan bersama keluarga berkurang. Aktivitas pariwisata tentu akan memicu perubahan dan penyesuaian dalam gaya hidup masyarakat (Suzanna, 2003).

2. Perilaku/moral

Menurut Ibrahim (1993), perubahan-perubahan itu bisa menjadi dorongan bagi peningkatan kualitas pelayanan, tapi juga dapat menyebabkan kemerosotan dalam berbagai aspek kehidupan. Sisi positifnya, interaksi yang terjadi antara masyarakat dan pengunjung wisata akan memberikan pengaruh terhadap aspek kehidupan baru dengan makna meningkatkan pandangan individu tentang nilai-nilai bermasyarakat yang baru, dan saling pengertian antara masyarakat dan wisatawan.

3. Bahasa

Bahasa daerah di sekitar objek wisata telah diubah oleh wisatawan yang berkunjung ke lokasi tersebut. Koentjaraningrat (1974) menyatakan bahwa adaptasi budaya adalah fase sosial yang terjadi ketika kelompok dengan adat istiadat dan tradisi yang berbeda bertemu dengan aspek-aspek budaya asing. Aspek-aspek ini secara bertahap diserap dan diintegrasikan ke dalam budaya masyarakat sambil mempertahankan ciri-ciri budaya asli.

4. Kesehatan

Pembangunan infrastruktur untuk memfasilitasi aktivitas wisata seringkali mengabaikan atribut ketahanan alam, yang berpotensi merugikan kesejahteraan manusia dan lingkungan sekitar, seperti yang diungkapkan oleh Suzanna (2003). Di kawasan wisata yang sedang berkembang, degradasi lingkungan dapat berdampak negatif pada kesehatan, menyebabkan gejala seperti batuk dan ketidaknyamanan mata.

5. Keagamaan

Ibrahim (1993) berpendapat bahwa perluasan pariwisata di berbagai wilayah Indonesia telah mempengaruhi hampir setiap aspek dan nilai kehidupan manusia. Hal ini mencakup aspek-aspek yang memiliki makna religius, monumental, dan historis.

Mengingat bahwa kegiatan pariwisata dapat memiliki dampak positif dan negatif bagi penduduk lokal, tidak mengherankan jika beberapa kelompok mengkhawatirkan implikasi dari pariwisata sekuler.

Pramitasari (2010) menyatakan bahwa dampak sosial sering kali ditekankan sebagai konsekuensi negatif dari perluasan pariwisata, meskipun terdapat aspek-aspek positif dan negatif yang terkait dengan pengembangan pariwisata. Berikut adalah daftar dampak positif dan negatif pariwisata terhadap faktor-faktor sosio-budaya, yaitu:

1. Pelestarian struktur dan monumen bersejarah yang diakui karena nilai budayanya.
2. Pelestarian budaya tradisional, tarian, upacara, dan pakaian tradisional

Sementara itu, dampak negatif aktivitas wisata dalam sosial budaya pendapat Pramitasari (2010) sebagai berikut.

1. Kerusakan situs sejarah, benda-benda budaya, dan monumen akibat aktivitas manusia.
2. Komersialisasi praktik budaya
3. Selain peningkatan prostitusi dan aktivitas kriminal, masyarakat lokal telah mengadopsi mentalitas konsumtif.
4. Interaksi dengan kelompok asing dapat menyebabkan degradasi nilai-nilai budaya dan norma-norma sosial

c. Dampak wisata terhadap lingkungan

Pengelolaan lingkungan dikatakan sebagai bidang yang terpadu yang mencakup semua komponen dan makhluk hidup. Adapun makhluk hidup ini mencakup manusia dan perilakunya, yang diperlukan untuk menjaga kelangsungan hidup manusia dan kesejahteraan spesies hidup lainnya. Pemikiran ini muncul dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang pengelolaan lingkungan hidup. Dalam ekosistem yang kompleks, peradaban dan lingkungannya berinteraksi secara terus-menerus. Sementara beberapa aktivitas memiliki dampak positif, yang lain memperburuk keadaan. Sebuah aktivitas dianggap memiliki dampak negatif jika memiliki efek merusak, sedangkan jika memiliki pengaruh yang bermanfaat, maka dianggap memiliki dampak positif terhadap lingkungan.

Secara khusus, melalui kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh aktivitas pariwisata, pariwisata dapat memiliki dampak negatif terhadap lingkungan sekitar. Suwena dan Widyatmaja (2017) menyatakan bahwa kegiatan pariwisata dapat memiliki dampak baik dan buruk terhadap lingkungan sekitar. Adapun dampak yang positif pariwisata terhadap lingkungan diantaranya yaitu :

1. Pemeliharaan dan pelestarian tempat-tempat alam seperti cagar alam, kebun botani, dan suaka margasatwa.

2. Situs arkeologi seperti Tanah Lot, Candi Prambanan, dan Candi Borobudur serta benda-benda bersejarah yang dilindungi.
3. Adanya sistem administrasi dan organisasi di lokasi wisata yang ditetapkan sebagai atraksi menjamin kelestarian destinasi tersebut. Tujuannya adalah untuk memastikan lokasi-lokasi ini dikelola dengan baik dan menarik aliran pengunjung lokal dan internasional yang signifikan.

Sementara itu, dampak negatif perkembangan pariwisata terhadap lingkungan diantaranya yaitu:

1. Ketidakmampuan infrastruktur untuk menghadapi jumlah wisatawan pada musim tertentu, sehingga hal ini akan menyebabkan terjadinya polusi dan kemacetan di daerah wisata.
2. Pencemaran gunung oleh pengunjung selama pendakian.
3. Penggunaan api unggun yang sembarangan di kebun botani, area perkemahan, dan tempat-tempat serupa.
4. Kerusakan terumbu karang yang disebabkan oleh wisatawan yang ingin memuaskan rasa ingin tahu mereka melalui interaksi fisik dan pengambilan fragmen karang kecil.
5. Pencemaran laut disebabkan oleh tumpahan minyak dari perahu motor dan pembuangan limbah cair pada kuantiti yang besar oleh hotel-hotel yang berlokasi dekat pantai.
6. Reklamasi lahan
7. Pengunjung situs telah mencoret-coret dinding, monumen bersejarah, dan struktur candi dengan grafiti.
8. Ketidakhadiran infrastruktur yang memadai untuk menampung lonjakan wisatawan selama musim puncak menyebabkan polusi dan kemacetan lalu lintas di kawasan wisata utama.

2.2 Identifikasi Kondisi Sarana dan Sebaran Fasilitas Sarana Prasarana Permukiman

2.2.1 Definisi Sarana dan Prasarana Permukiman

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 sarana adalah fasilitas lingkungan didefinisikan sebagai sarana lingkungan yang membantu pelaksanaan dan pengembangan kegiatan sosial, budaya, dan ekonomi. Menurut SNI, jenis sarana yang dikategorikan sebagai fasilitas permukiman meliputi fasilitas pemerintah dan layanan publik, lembaga pendidikan, fasilitas kesehatan, tempat ibadah, fasilitas perdagangan dan industri, ruang terbuka, taman, dan lapangan olahraga. Sesuai dengan kriteria tertentu untuk menyediakan kondisi hidup yang layak, sehat, aman, dan dapat diterima, prasarana merupakan fondasi fisik lingkungan perumahan. Prasarana terdiri dari fasilitas dan sistem dasar yang menyediakan kebutuhan bagi suatu negara, kota, atau wilayah. Adapun prasarana perumahan meliputi jaringan jalan, sistem drainase, sistem penyediaan air minum, sistem pembuangan air limbah dan sanitasi,

sistem pengelolaan sampah, jaringan listrik, dan jaringan telekomunikasi (Fisu, 2018). pencapaian kebutuhan permukiman dengan kepuasan kebutuhan sarana dan prasarana dapat juga meingkatkan perekonomian sekitar (fisu, 2020)

Pendapat Salamah et.al., (2017) menjelaskan prasarana yakni semua fasilitas yang memiliki fungsi menghidupkan sarana wisata dengan memberikan pelayananan yang menjadi kepuasan kebutuhan wisatawan, dapat menarik wisatawan berkunjung ke objek wisata. Pendapat yang telah diuraikan memiliki kesimpulan terkait definisi sarana adalah kelengkapan dasar fisik hendak memenuhi kebutuhan dasar manusia dari suatu wilayah dapat meningkatkan perekonomian. Prasarana merupakan fasilitas penunjang utama diwujudkan proses kegiatan dalam kota, yang kemudian akan menjadi penentu perkembangan kota.

2.2.2 Jenis Sarana Dan Prasarana Permukiman

Menurut buku pedoman penyusunan rencana pelayanan masyarakat permukiman kota menyebutkan bahwa prasarana dasar kota memiliki fasilitas pelayanan yang memiliki berbagai jenis sarana dan prasarana diantaranya :

1. Sarana pemerintahan dan pelayanan umum

Merupakan fasilitas penunjang dasar proses pelaksanaan pemerintahan serta pelayanan masyarakat. Jenis sarana pemerintahan dan pelayanan umum seperti kantor pelayanan guna administrasi kependudukan, kantor atau pos pelayanan keamanan dan keselamatan seperti pos keamanan dan kebakaran. Serta kantor pelayanan jasa seperti loket pembayaran air bersih dan listrik.

2. Sarana Pendidikan

Sarana pendidikan yang menjadi fasilitas penunjang kegiatan pembelajaran memiliki tingkat penfifikan yang memiliki sifat umum/formal. Tingkatan sarana pendidikan seperti

- a. Taman Kanak-kanak (TK) merupakan kegiatan pembelajaran tingkatan pra dengan fokus kegiatan bermain dengan presentase 75% sebagai pengenalan.
- b. Sekolah dasar (SD) ialah bentuk satuan pendidikan dasar kegiatan pembelajaran dengan program enam tahun.
- c. Sekolah lanjutan tingkat pertama (SLTP) bentuk tingkat pendidikan yang menyelenggarakan progra, tiga tahun setelah menyelesaikan tingkat SD
- d. Sekolah menengah umum (SMU) sebagai tingkat pendidikan yang mengutamakan perluasan pengetajiam serta peningkatan keterampilan murid guna melanjutkan jenang pendidikan yang lebih tinggi.
- e. Sarana penunjang pembelajaran lain di lingkungan suatu lingkungan permumahan dapat seperti taman bacaan atau perpustakaan guna meningkatkan minat baca serta menambahkan ilmu pengetahuan.

3. Sarana kesehatan

Layanan kesehatan memainkan peran strategis dalam meningkatkan kesehatan masyarakat dan mengatur pertumbuhan penduduk di dalam komunitas. Posyandu, atau pos pelayanan kesehatan terpadu, merupakan jenis fasilitas kesehatan yang memerlukan penyediaan. Posyandu bertugas memberikan pelayanan kesehatan kepada bayi dan balita. Selain memberikan pengobatan dan vaksinasi, fasilitas kesehatan masyarakat juga menyediakan terapi kuratif non-rumah sakit. Pusat kesehatan dan klinik kesehatan masyarakat menjalankan peran yang telah ditetapkan sebagai lembaga pelayanan kesehatan primer. Klinik kesehatan masyarakat dan pusat kesehatan tambahan adalah lembaga kesehatan yang memberikan layanan medis kepada penduduk di daerah dengan populasi rendah dan sumber daya medis terbatas. Terapi rawat jalan menjadi fokus utama layanan kesehatan individu yang ditawarkan oleh sebagian besar praktik medis. Apotek menyediakan obat-obatan untuk mempercepat pemulihan atau mencegah penyakit.

4. Sarana peribadatan

Sarana peribadatan sebagai fasilitas kebutuhan rohani yang disediakan pada lingkungan permukiman sebagai perencanaan sesuai dengan keputusan masyarakat sekitar. Jenis sarana memiliki ketergantungan dengan kondisi struktur penduduk menurut agama yang diyakini. Adapun jenis sarana peribadatan diantaranya:

- a. Masjid dan ruang shalat berfungsi sebagai tempat ibadah bagi umat Islam, memfasilitasi pertemuan, pembacaan Al-Quran, dan peringatan peristiwa sejarah penting.
- b. Gereja berfungsi sebagai tempat ibadah bagi umat Kristen, memfasilitasi pertemuan dan peringatan peristiwa sejarah penting.
- c. Vihara berfungsi sebagai tempat ibadah bagi umat Buddha, memfasilitasi pertemuan dan peringatan peristiwa sejarah penting dalam rangka ibadah dan tradisi keagamaan.
- d. Pura berfungsi sebagai tempat ibadah bagi umat Hindu, memfasilitasi pertemuan dan peringatan peristiwa sejarah penting dalam rangka ibadah dan tradisi keagamaan.

5. Sarana perdagangan dan jasa

Berdasarkan pasal 12 undang-undang nomor 7 tahun 2014 menyatakan pemerintah, Pemda, serta pelaku usaha mengembangkan sarana perdagangan. Sarana perdagangan berdasarkan SNI

- a. Toko/warung skala RT sebagai pemenuhan kebutuhan sehari-hari
- b. Tempat usaha yang menyediakan berbagai layanan, termasuk telekomunikasi, fotokopi, dan layanan serupa.
- c. Pusat perbelanjaan yang merupakan tempat untuk membeli makanan, pakaian, peralatan rumah tangga, dan kebutuhan pokok lainnya.
- d. Pusat perbelanjaan dan pusat komersial di kecamatan, selain menyediakan kebutuhan sehari-hari, juga menyediakan layanan seperti perawatan kendaraan

bermotor, fasilitas produksi yang tidak mencemari lingkungan, tempat hiburan, dan berbagai kegiatan komersial.

6. Sarana kebudayaan dan rekreasi

Pendirian fasilitas untuk mendorong ekspresi kreatif dan kegiatan budaya serta rekreasi di dalam komunitas, termasuk pusat seni dan bangunan multifungsi, guna memberikan keseimbangan psikologis dan menumbuhkan rasa menghargai diri sendiri. Fasilitas seperti bioskop, gedung komunitas, ruang serbaguna, dan ruang rapat merupakan contoh fasilitas yang dikategorikan sebagai fasilitas budaya dan rekreasi.

7. Ruang Terbuka, Taman Dan Lapangan Olahraga

Sarana yang memiliki fungsi penyanggah kehidupan wilayah perkotaan. Taman adalah tempat yang dapat digunakan baik di dalam maupun di luar ruangan untuk menyediakan lingkungan yang nyaman untuk beristirahat dan bersantai. Taman dapat diklasifikasikan menjadi dua jenis: taman alam dan taman buatan. Contoh dari berbagai jenis taman yang sering ditemui antara lain taman perumahan, taman lingkungan, lapangan bermain, dan taman rekreasi. Lapangan olahraga adalah area terbuka yang tidak ditumbuhi vegetasi, yang terutama diperuntukkan untuk kegiatan atletik, dan berfungsi sebagai tempat penyelenggaraan acara-acara tersebut

2.3 Analisis Kebutuhan Sarana Dan Prasarana berdasarkan SNI 03-1733-2004

Standar kebutuhan sarana dan prasarana permukiman menggunakan pedoman SNI 03-1733-2004 tata cara perencanaan lingkungan perumahan di perkotaan. Sarana kebutuhan sebagai acuan perencanaan lingkungan hunian yang berfungsi menciptakan kualitas hidup yang baik bagi masyarakat. Standar mencakup berbagai jenis sarana dan prasarana yang harus tersedia.

Menurut Sugiyono (2010) Faktor penentu kebutuhan sarana dan prasarana diantaranya pertumbuhan penduduk. Peningkatan jumlah penduduk di suatu wilayah berdampak langsung pada kebutuhan sarana dan prasarana. Dengan bertambahnya populasi, permintaan terhadap fasilitas publik meningkat. Perencanaan wajib mempertimbangkan proyeksi pertumbuhan penduduk guna menghindari kekurangan fasilitas di masa depan. Selain itu, kebijakan serta regulasi pemerintah penting dalam menentukan kebutuhan sarana dan prasarana permukiman yang mengacu pada SNI 03-1733-2004

2.3.1 Sarana Pemerintahan Dan Pelayanan Umum

Pemerintah dan pelayanan umum untuk sebagai bentuk tugas pemerintah guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Pelayanan umum menurut UU No 25 Tahun 2009 merupakan rangkaian kegiatan dalam pemenuhan kebutuhan sesuai dengan peraturan atau regulasi bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang dan jasa yang di sediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Kodoatie (2005) menyebutkan bahwa infrastruktur pemerintahan yang memadai sangat penting sebagai mendukung penyelenggaraan

administrasi pelayanan publik yang efisien. Infrastruktur pemerintah menjalankan fungsi-fungsi dasarnya dengan lebih efektif. Ketentuan untuk mengetahui kebutuhan sarana pemerintahan dan pelayanan umum dapat dilihat pada tabel II.2

Tabel II. 2 kebutuhan sarana pemerintahan dan pelayanan

No	Jenis sarana	Jumlah penduduk (jiwa)	
1.	Balai pertemuan	Rw	2.500
2.	Pos hansip		2.500
3.	Gardu listrik		2.500
4.	Telepon umum, bis surat		2.500
5.	Parkir umum		2.500
6.	Kantor kelurahan	Kelurahan	30.000
7.	Pos kamtib		30.000
8.	Pos pemadam kebakaran		30.000
9.	Agen Pelayanan pos		30.000
10.	Loket pembayaran air bersih		30.000
11.	Loket pembayaran listrik		30.000
12.	Telepon umum, bis surat, bak sampah kecil		30.000
13.	Parkir umum		30.000

Sumber : SNI 03-1733-2004

2.3.2 Sarana Pendidikan

Sarana pendidikan merupakan infrastruktur sebagai penunjang proses belajar-mengajar, seperti sekolah, perguruan tinggi, laboratorium, dan perpustakaan. Menurut grigg (1988), ketersediaan sarana pendidikan yang memadai tidak hanya meningkatkan kualitas sumber daya manusia, akan tetapi juga mendukung perkembangan ekonomi suatu wilayah. Pendidikan berkualitas menjadi landasan penting guna mencetak individu yang kompeten dalam menghadapi tantangan global. Kebutuhan sarana pendidikan dalam SNI hanya menyangkut bidang pendidikan yang bersifat formal/umum dapat dilihat pada tabel II.3

Tabel II. 3 Standar Kebutuhan Sarana Pendidikan

No.	Jenis sarana	Jumlah penduduk (jiwa)
1.	Taman kanak- kanak	1.250
2.	Sekolah dasar	1.600
3.	Sltp	4.800
4.	Smu	4.800
5.	Taman Bacaan	2.500

Sumber : SNI 03-1733-2004

2.3.3 Sarana Kesehatan

Infrastruktur kesehatan dirancang untuk melayani kebutuhan kesehatan masyarakat. WHO (2020) menyatakan ketersediaan fasilitas kesehatan yang memadai dapat meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan medis yang berkualitas, sehingga mempercepat kemajuan dalam bidang kesehatan masyarakat. Standar Nasional Indonesia (SNI) menyatakan bahwa peran utama fasilitas kesehatan adalah menyediakan layanan medis bagi masyarakat. Selain itu, lembaga-lembaga ini berperan penting dalam mempercepat kemajuan kesehatan masyarakat dan mengawasi pertumbuhan populasi negara. Untuk dapat mengetahui kebutuhan sarana kesehatan menggunakan ketentuan sni yang dapat dilihat pada tabel II.4

Tabel II. 4 Standar Kebutuhan Sarana Kesehatan

No	Jenis sarana	Jumlah penduduk (jiwa)
1.	Posyandu	1.250
2.	Balai Pengobatan Warga	2.500
3.	Bkia / klinik Bersalin	30.000
4.	Puskesmas Pembantu dan balai Pengobatan Lingkungan	30.000
5.	Puskesmas dan balai Pengobatan	120.000
6.	Tempat Praktek Dokter	5.000
7.	Apotik	30.000

Sumber : SNI 03-1733-2004

2.2.4 Sarana Peribadatan

Sarana peribadatan secara hukum diwajibkan untuk menyediakan fasilitas yang mendukung pemenuhan kebutuhan spiritual. Ketersediaan prasarana tersebut bergantung pada komposisi agama penduduk dan norma-norma masyarakat setempat dalam rutinitas ibadah. Sementara itu, Kusumastuti (2015) menegaskan sarana peribadatan memegang peran penting dalam memperkuat kohesi sosial dengan menjadi pusat interaksi antarwarga. Ketentuan kebutuhan sarana dan prasarana peribadatan menggunakan acuan SNI yang dapat dilihat tabel II.5

Tabel II. 5 Standar Kebutuhan Sarana Peribadatan

No	Jenis sarana	Jumlah penduduk (jiwa)
1.	Musholla/langgar	250
2.	Masjid warga	2.500
3.	Masjid kelurahan	30.000
4.	Sarana ibadah agama lain	Tergantung sistem kekerabatan hirarki lembaga

Sumber : SNI 03-1733-2004

2.3.5 Sarana Perdagangan Dan Jasa

Sarana perdagangan dan jasa, berperan penting menyediakan kebutuhan masyarakat sekaligus mendorong aktivitas ekonomi. Menurut Nur et al. (2021), keberadaan infrastruktur perdagangan yang baik akan dapat meningkatkan perputaran produk dan jasa, meningkatkan pendapatan regional, serta menciptakan peluang kerja bagi masyarakat. Dalam konteks penyediaan layanan, jumlah masyarakat yang dilayani bukanlah satu-satunya pertimbangan. Selama periode ini, lokasi fasilitas-fasilitas tersebut akan mempertimbangkan jangkauan area layanan yang memiliki keterkaitan dengan kriteria-kriteria penting yang harus dipenuhi untuk menyediakan layanan ke suatu wilayah. Untuk mengetahui kebutuhan sarana perdagangan dan niaga dapat dilihat pada tabel II.6

Tabel II. 6 standar kebutuhan sarana perdagangan dan jasa

No.	Jenis sarana	Jumlah penduduk pendukung (jiwa)
1.	Toko / warung	250
2.	Pertokoan	6.000
3.	Pusat pertokoan + pasar lingkungan pusat	30.000
4.	Perbelanjaan dan niaga (toko + pasar + bank + kantor)	120.000

Sumber : SNI 03-1733-2004

2.3.6 Sarana Kebudayaan Dan Rekreasi

Sarana kebudayaan dan rekreasi bangunan sebagai wadah berbagai kegiatan kebudayaan dan atau rekreasi. Sarana ini mencakup ruang konferensi, gedung serbaguna, bioskop, pusat seni, dan usaha sejenis. Untuk memfasilitasi integrasi pemanfaatan dan pengelolaan struktur-struktur ini sesuai dengan signifikansi masing-masing pada periode sejarah yang berbeda, bangunan yang diperuntukkan untuk fungsi pemerintahan dan layanan publik.

Tabel II. 7 Standar Kebutuhan Sarana Kebudayaan Dan Rekreasi

No.	Jenis sarana	Jumlah penduduk pendukung (jiwa)
1.	Balai warga/ balai pertemuan	2.500
2.	Balai serbaguna / balai karang taruna gedung serbaguna	30.000
3.	Gedung serbaguna	120.000
4.	Gedung bioskop	120.000

Sumber : SNI 03-1733-2004

2.3.7 Sarana Ruang Terbuka Hijau

Ruang terbuka merujuk pada lanskap, hardscape, taman, atau area rekreasi yang terletak di dalam lingkungan perkotaan. Ruang terbuka merupakan unsur yang secara ekologi berkelanjutan. Peran dan fungsi ruang terbuka hijau (RTH) diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1988. Peraturan ini mendefinisikan “ruang terbuka hijau” sebagai tempat yang terutama ditandai oleh vegetasi, baik alami maupun budidaya, yang dimaksudkan untuk layanan biologis dan sebagai penyangga bagi lingkungan perkotaan. Adapun kebutuhan dan penggolongan sarana ruang terbuka hijau di lingkungan perumahan dapat dilihat pada tabel II.8

Tabel II. 8 Standar Kebutuhan Sarana Ruang Terbuka Hijau

No.	Jenis sarana	Jumlah penduduk pendukung (jiwa)
1.	Taman/tempat main	250
2.	Taman/tempat main	2.500
3.	Taman dan lapangan olahraga	30.000
4.	Jalur hijau	-
5	Kuburan/pemakaman umum	120.000

Sumber : SNI 03-1733-2004

2.3.8 Prasarana Jaringan Jalan

Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2004 mendefinisikan jalan raya sebagai fasilitas infrastruktur yang meliputi segmen jalan, beserta struktur dan peralatan pendukung yang dimaksudkan untuk lalu lintas kendaraan bermotor, kereta api, dan kabel. Secara umum, jalan raya dibagi menjadi beberapa komponen, termasuk lajur lalu lintas, bahu jalan, trotoar, median, parit samping, trotoar, dan perlindungan tepi. Jalan raya dikategorikan berdasarkan sistem, fungsi, status, dan kelas, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 yang disahkan pada tahun 2004. Untuk mengoptimalkan efisiensi pengelolaan jaringan jalan raya, jalan raya telah diklasifikasikan sebagaimana tercantum dalam Tabel II.9

Tabel II. 9 Klasifikasi Jalan Umum Di Indonesia

Pembagian	Klasifikasi	Definisi
Menurut sistem	Sistem jaringan jalan Primer	Sistem jaringan jalan dengan peranan pelayanan distribusi barang dan jasa untuk pengembangan semua wilayah di tingkat nasional, dengan menghubungkan semua simpul jasa distribusi yang berwujud pusat Kegiatan

Pembagian	Klasifikasi	Definisi
	Sistem jaringan jalan Sekunder	Sistem jaringan jalan dengan peranan Pelayanan distribusi barang dan jasa untuk masyarakat di dalam kawasan perkotaan
Menurut fungsi	Jalan arteri	Jalan umum yang berfungsi melayani angkutan utama dengan ciri perjalanan jarak jauh, kecepatan rata-rata tinggi, dan jumlah Jalan masuk dibatasi secara berdaya guna
	Jalan kolektor	Jalan umum yang berfungsi melayani angkutan pengumpul atau pembagi dengan ciri perjalanan jarak sedang, kecepatan rata-rata Sedang, dan jumlah jalan masuk dibatasi
	Jalan lokal	Jalan umum yang berfungsi melayani angkutan setempat dengan ciri perjalanan jarak dekat, kecepatan rata-rata rendah, dan Jumlah jalan masuk tidak dibatasi
	Jalan lingkungan	Jalan umum yang berfungsi melayani angkutan lingkungan dengan ciri perjalanan Jarak dekat, dan kecepatan rata-rata rendah

Sumber : UU No. 38 Tahun 2004 dan PP No. 34 Tahun 2006, Tentang Jalan.

Disisi lain, keselamatan jalan raya berkaitan dengan beberapa unsur jalan raya, termasuk hak prioritas, kepemilikan jalan, dan zona pemantauan. Partisipasi dalam kegiatan yang mengganggu operasional jalan raya di dalam zona hak prioritas jalan, properti jalan, atau zona pemantauan jalan dilarang, sebagaimana diatur dalam Pasal 12 Undang-Undang Pengelolaan Keselamatan Jalan Raya Tahun 2011 (Pengelolaan Keselamatan Jalan Raya, 2011).

2.3.9 prasarana jaringan drainase

Kawasan permukiman wajib dilengkapi dengan jaringan drainase sesuai dengan spesifikasi teknis dan batasan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini khususnya berlaku untuk desain keseluruhan sistem drainase di kawasan permukiman perkotaan. Jaringan drainase memfasilitasi pengaliran air permukaan ke badan penerima dan/atau sistem infiltrasi buatan, yang wajib diterapkan di kawasan permukiman di daerah perkotaan dan pinggiran kota. Bagian dari jaringan drainase dilihat pada tabel II.10

Tabel II. 10 Bagian dari jaringan drainase

Sarana	Prasarana
Badan penerima air	Sumber air di permukaan tanah (laut, sungai, danau)

Sarana	Prasarana
	Sumber air di bawah permukaan tanah (air tanah akifer)
Bangunan pelengkap	Gorong-gorong
	Pertemuan saluran
	Bangunan terjunan
	Jembatan
	<i>Street inlet</i>
	Pompa dan pintu air

Sumber : SNI 02-2406-1991,

2.3.10 Prasarana Air Bersih

Kualitas air memenuhi kriteria kesehatan untuk air minum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan aman untuk dikonsumsi setelah direbus (Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1405/MENKES/SK/XI/2002). Air minum digunakan untuk kebutuhan sehari-hari. Sumber air bersih dibagi menjadi empat kategori: air hujan, air permukaan, air tanah, dan air mata air.

Terdapat kebutuhan yang terus-menerus dan tak terpuaskan akan air yang tidak terkontaminasi. Peningkatan populasi, yang terkait dengan perubahan kondisi sosial dan ekonomi penduduk, telah menyebabkan peningkatan permintaan (Chaidir dan Eveline, 2015). Kodoatie (2003) mendefinisikan permintaan air sebagai volume air yang diperlukan untuk mendukung semua aktivitas manusia, termasuk pasokan air minum untuk penggunaan domestik dan non-domestik. Permintaan air rumah tangga ditentukan oleh ukuran populasi dan penggunaan air per kapita. Brahmanja (2014) menegaskan bahwa penilaian dan perkiraan penggunaan air seringkali bergantung pada asumsi atau metode yang didasarkan pada klasifikasi perkotaan dan ukuran populasi kota tertentu. Menurut Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1405/Menkes/SK/XI/2002, kebutuhan air harian dan kualitasnya harus memenuhi standar kesehatan untuk air minum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan air harus dianggap aman untuk dikonsumsi setelah direbus.

Setiap rumah tangga harus memiliki akses ke air bersih yang memenuhi kebutuhan rumah tangga. Kawasan permukiman harus dilengkapi dengan jaringan air limbah sesuai dengan batasan teknis dan ketentuan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ketersediaan air bersih memiliki dampak signifikan terhadap kesejahteraan manusia, menjadikannya unsur vital dalam kehidupan manusia. Penyediaan air bersih tidak hanya penting bagi rumah tangga, tetapi juga untuk pertimbangan sosial, ekonomi, serta fasilitas umum.

Tabel II. 11 Standar Kebutuhan Air Bersih

No.	Kategori	Jumlah penduduk (jiwa)	Pemakaian air (liter/hari/jiwa)
1.	Metropolitan	>1.000.000	150-200
2.	Kota besar	500rb-1jt	120-150
3.	Kota sedang	100.000-500.000	100-125
4.	Kota kecil	20.000-100.000	90-110
5.	Semi urban	3.000-20.000	60-90

Sumber : SNI 6728. 1:2015

2.3.11 Prasarana Limbah

Air limbah cair merujuk pada air yang tidak lagi layak digunakan, yang berasal dari berbagai sumber seperti limbah domestik, limbah industri, air tanah, air permukaan, dan sumber limbah cair lainnya. Limbah cair dapat berdampak negatif baik bagi manusia maupun lingkungan. Peningkatan populasi di suatu wilayah akan secara otomatis menyebabkan peningkatan volume limbah yang dihasilkan. Oleh karena itu, sangat penting untuk menghubungkan air limbah dari lingkungan ke sistem pembuangan limbah perkotaan atau menggunakan teknologi pengolahan alternatif. Jika ruang penyerapan terpisah tidak dapat disediakan untuk setiap rumah, maka perlu didirikan area penyerapan komunal untuk melayani banyak rumah tangga.

2.3.12 Jaringan Persampahan

Manusia menghasilkan sampah sebagai hasil dari aktivitas sehari-hari, yang meliputi sampah rumah tangga dan limbah serupa dengan limbah domestik. Indikator utama yang membuat wilayah tersebut dapat dikatakan berkembangnya dapat dilihat melalui mempunyai pengelolaan sampah dengan baik. Permasalahan sampah mempunyai tanggung jawab yang harus diselesaikan dengan pemerintah dan juga perlu dengan kesadaran masyarakat. Untuk mengetahui kebutuhan prasarana persampahan mengacu pada SNI 03-3242-1994. Untuk spesifikasi bangunan minimal yang dapat digunakan dapat dilihat pada tabel II.12

Tabel II. 12 Spesifikasi Peralatan Persampahan

No.	Jenis peralatan	Kapasitas pelayanan		
		Volume (m3)	Kk	Jiwa
1..	Warda komunal	0,5-1,0	20-40	100-200
2..	Komposter komunal	0,5-1,0	10-20	50-100
3.	Alat pengepul: gerobak sampah bersekat/sejenisnya	1	128	640
4.	Container amroll truk	6	640	3.200
		10	1.375	5.330
5.	Tps			

No.	Jenis peralatan	Kapabilitas pelayanan		
		Volume (m3)	Kk	Jiwa
	Tipe 1	100	500	2.500
	Tipe 2	300	6000	30.000
	Tipe 3	1000	24.000	120.000
6.	Bangunan pendaur ulang sampah skala lingkungan	150	600	3.000

Sumber : SNI 03-3242-1994

2.3.13 Prasarana Listrik

Prasarana listrik merupakan salah satu bagian dari kelengkapan fisik suatu lingkungan atau wilayah. UU nomor 30 tahun 2007, prasarana listrik merupakan sistem yang mengatur pembangkitan, transmisi dan distribusi tenaga listrik untuk melakukan pemenuhan terhadap kebutuhan masyarakat. Prasarana listrik sebagai penunjang produktivitas di berbagai sektor, baik di perkotaan maupun pedesaan. Kebutuhan daya listrik setiap rumah dapat dilayani minimum 450 VA/jiwa dan 40% dari seluruh kebutuhan rumah tangga guna sarana lingkungan.

2.3.14 Prasarana Telepon

Jaringan telepon merupakan sistem komunikasi yang memberikan pertukaran informasi suara atau data antara pengguna melalui perangkat telekomunikasi. Jaringan telepon merupakan infrastruktur yang terdiri perangkat untuk mentransfer informasi antar pengguna yang berada di lokasi yang berbeda. Oleh sebab itu, lingkungan permukiman harus dilengkapi jaringan telepon sesuai ketentuan dan persyaratan teknis yang diatur dalam kebijakan. Berdasarkan SNI 03-1733-2004 beberapa persyaratan, kriteria yang harus dipenuhi diantaranya :

- Penyediaan kebutuhan sambungan telepon dibutuhkan minimal 1 sambungan telepon umum untuk setiap 250 jiwa penduduk (unit rt) yang ditempatkan pada pusat-pusat kegiatan lingkungan RT
- Penyediaan jaringan telepon dapat diintegrasikan dengan jaringan pergerakan (jaringan jalan) dan jaringan prasarana / utilitas lain seperti tiang listrik yang ditempatkan pada area DAMIJA pada sisi jalur hijau yang tidak menghalangi sirkulasi pejalan kaki di trotoar.

2.3.15 Prasarana Transportasi Lokal

Prasarana transportasi lokal merupakan fasilitas penunjang kegiatan perpindahan yang mencakup fasilitas seperti jalan, jembatan, halte dan terminal (Tamin, 2000). Transportasi ialah aktivitas yang melibatkan pemindahan barang atau orang dari satu tempat ke tempat lain. Dalam konteks lokal, prasarana transportasi harus dirancang untuk mendukung konektivitas antarwilayah serta memenuhi kebutuhan masyarakat. Di kawasan perkotaan, kelengkapan sarana seperti jalur angkutan umum yang terintegrasi dengan baik

dapat meningkatkan efisiensi mobilitas dan mengurangi ketergantungan pada kendaraan pribadi. (Morlok, 1978).

Berdasarkan SNI 03-1733-2004 lingkungan permukiman memiliki akses yang tidak terlampau jauh dengan maksimum 1 km menuju sarana transportasi. Beberapa persyaratan, kriteria dan kebutuhan yang harus dipenuhi adalah penyediaan jaringan sirkulasi kendaraan pribadi dan kendaraan umum berikut terminal/ tempat pemberhentian lainnya. Adapun persyaratan dan kriteria ini disusun sebagai acuan bagi pengembang lingkungan perumahan dalam tabel II.13 sebagai fasilitas pendukung, perlengkapan jalan dan angkutan umum.

Tabel II. 13 Fasilitas Pendukung, Perlengkapan Jalan Dan Angkutan Umum.

Hirarki Jalan Perumahan	Perlengkapan Jalan	Fasilitas Pendukung	Angkutan Umum	Beban As (Mst)	Keterangan
Lokal Sekunder I	- Rambu - Marka jalan - Lampu lalu lintas di persimpangan - Tanpa kereb	- Teluk bis - Parkir di badan jalan - Jalur pejalan kaki (trotoar tanpa kereb)	- Angkot (Minibus ≤ 12 Tempat Duduk) - Bis (< 24 Tempat Duduk)	≥ 8 Ton	(Pp 43/1993) (Pp 26/1985)
Lokal Sekunder II	- Ada rambu jika perlu - Pengendali kecepatan - tanpa kereb	- Teluk bis - Parkir di badan jalan - Jalur pejalan kaki (trotoar tanpa kereb)	- Angkot (minibus ≤ 12 tempat duduk)	≥ 8 ton	-
Lokal Sekunder III	-	- Jalur pejalan kaki (trotoar tanpa kereb) - Parkir di luar badan jalan	-	< 5 Ton	-
Lingkungan I	-	- Jalur pejalan kaki (trotoar tanpa kereb) - Parkir di luar badan jalan	-		-

Hirarki Jalan Perumahan	Perlengkapan Jalan	Fasilitas Pendukung	Angkutan Umum	Beban As (Mst)	Keterangan
Lingkungan II	-	- Jalur pejalan kaki (trotoar tanpa kereb) - Parkir di luar badan jalan	-		-

Sumber : sni 03-1733-2004, tata cara perencanaan kawasan perumahan kota

a. Penyediaan jaringan sirkulasi pedestrian

b. Penyediaan jaringan parkir

Peraturan dan standar ini bertujuan untuk memberikan pedoman bagi pengembang perumahan skala besar agar dapat mematuhi persyaratan aksesibilitas sistem angkutan umum lokal.

1) Lahan parkir untuk area hunian

- Zona parkir perumahan terletak di tingkat RT dan tersebar di setiap pusat kawasan perumahan. Tempat parkir ini memiliki alokasi reguler sebesar 100 meter persegi dan juga berfungsi sebagai tempat parkir sementara untuk kendaraan yang digunakan dalam angkutan umum;
- Zona parkir perumahan di tingkat RW tersebar di setiap pusat kawasan perumahan, dengan alokasi tipikal sebesar 400 meter persegi. Fasilitas parkir ini juga berfungsi sebagai tempat parkir sementara untuk kendaraan yang digunakan dalam angkutan umum;
- Zona parkir area hunian skala Kelurahan lokasinya tersebar di setiap pusat lingkungan hunian pada skala kelurahan, dan mempunyai standar penyediaan 2000 meter persegi dan dipisahkan dengan terminal wilayah kelurahan (seluas 1.000 meter persegi) serta pangkalan oplet/angkot (seluas 200 meter persegi)

2.4 Sintesa Literatur

Pada penyusunan tugas akhir ini, kumpulan literatur yang telah selesai direview dan ditinjau kembali referensi termasuk jurnal-jurnal maupun referensi lainnya yang terpercaya dirumuskan dalam sebuah tabel sintesa literatur yang digunakan untuk menganalisis kebutuhan sarana dan prasarana permukiman akibat aktivitas religi makam sapuro Kota

Pekalongan. Berikut tabel sintesa literatur yang digunakan sebagai pedoman penyusunan tugas akhir dengan judul Analisis kebutuhan sarana dan prasarana permukiman akibat aktivitas religi makam sapuro Kota Pekalongan. Tabel sintesa literatur dapat dilihat pada tabel II.14

Tabel II. 14 Sintesa Literatur

No.	Sasaran	Kajian Literatur	Deskripsi Teori	Sumber	Sintesa Literatur	Variabel	/Indikator
1.	Identifikasi wisata religi makam sapuro Kota Pekalongan	Definisi Pariwisata	Pariwisata merupakan suatu kegiatan perpindahan manusia dari tempat asal ke tempat lain yang memiliki tujuan guna melepaskan diri dari suatu kesibukan untuk mencari suasana lain	(Ibrahim, 2017);	Pariwisata merupakan kegiatan yang perjalanan dari suatu tempat ke tempat lain yang memiliki sifat sementara dan dapat dilakukan oleh perseorangan atau berkelompok sebagai usaha keseimbangan dan kebahagiaan dengan lingkungan hidup dimensi sosial, budaya, alam dan ilmu. Sedangkan wisata religi merupakan perjalanan yang dilakukan seseorang dengan tujuan untuk mencari atau meningkatkan amalan suatu agama.	1. aktivitas wisata 2. Pelaku 3. Tujuan	1. Objek wisata religi makam sapuro 2. Peziarah 3. Ziarah dan Berdoa
			Pariwisata merujuk pada suatu perjalanan yang dilakukan dari suatu tempat menuju ke tempat lain yang mempunyai sifat yang sementara dan dapat dilakukan oleh perseorangan atau berkelompok sebagai usaha keseimbangan dan kebahagiaan dengan lingkungan hidup dimensi sosial, budaya, alam dan ilmu	(Kodhyat, 1998).			
			Pariwisata adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan kegiatan perjalanan yang dilakukan secara sukarela dan bersifat	Undang-Undang Republik Indonesia No. 9 Tahun 1990			

No.	Sasaran	Kajian Literatur	Deskripsi Teori	Sumber	Sintesa Literatur	Variabel	/Indikator
			sementara untuk menikmati objek dan daya tarik wisata, termasuk perusahaan objek dan daya tarik wisata, serta usaha-usaha yang terkait di bidang tersebut				
		Jenis pariwisata	Pariwisata memiliki bermacam jenis wisata yang dapat dinikmati oleh wisatawan terdapat beberapa jenis-jenis pariwisata yaitu : 1. Cultural tourism (Wisata Budaya) 2. Recreational tourism (wisata kesehatan) 3. Sport tourism (wisata olahraga) 4. Political tourism (wisata politik) 5. Religion tourism (wisata religi)	(Yoeti, 1982 :111)	Jenis pariwisata yaitu <i>Cultural tourism</i> (wisata budaya), <i>Recreational tourism</i> (wisata kesehatan), <i>Sport tourism</i> (wisata olahraga), <i>Political tourism</i> (wisata politik), <i>Religion tourism</i> (wisata religi)	<i>Religion tourism</i> (wisata religi)	1. Objek wisata religi makam sapuro : 2. Pelaku wisata : Wisatawan Peziarah 3. Aktivitas wisata ziarah dan berdoa 4. Daya tarik : situs makam tokoh agama (Habib Ahmad bin Abdullah bin Thalib Alatas) 5. Aksesibilitas : Tersedia petunjuk arah dan informasi bagi wisatawan 6. Sarana dan prasarana : Ketersediaan fasilitas seperti tempat ibadah, toilet,
			1. Wisata budaya 2. Wisata olahraga 3. Wisata komersial 4. Wisata industri 5. Wisata bahari	Dimuru (2023)			

No.	Sasaran	Kajian Literatur	Deskripsi Teori	Sumber	Sintesa Literatur	Variabel	/Indikator
			6. Wisata cagar alam				area istirahat, dan warung makan.
		Komponen Pariwisata	Pariwisata merupakan proses pergerakan sementara individu dari tempat tinggal ke lokasi lain dengan tujuan rekreasi, relaksasi maupun pengalaman budaya. Komponen pariwisata yang harus ada 2a adalah attraction dan accomodation	hadiwijoyo (2012)	Komponen pariwisata, dalam objek ini hanya mengambil 5a dari hasil identifikasi antara attraction (atraksi), accessibility (aksesibilitas), amenity (amenitas), accomodation (akomodasi), activities (aktifitas).	1. <i>Attraction</i> 2. <i>Accomodation</i> 3. <i>Accessibility</i> 4. <i>Amenity</i> 5. <i>Activities</i>	1. Aktivitas wisata : mengunjungi situs makam 2. Ketersediaan Jenis akomodasi: Losmen dan hotel 3. Jaringan Jalan, petunjuk arah, ketersediaan tempat parkir 4. Sarana dan prasarana penunjang wisata : Pos Keamanan, kios cindra mata 5. Aktivitas wisata dan kunjungan makam tokoh agama
			Komponen pariwisata adalah 3a, yakni attraction, activity, dan accessibility	Stange dan Brown (2013)			
			Komponen pariwisata, dalam objek ini hanya mengambil 5a dari hasil identifikasi antara attraction (atraksi), accessibility (aksesibilitas), amenity (amenitas), accomodation (akomodasi), activities (aktifitas).	(Sunaryo, 2013)			
		Definisi Dampak	Pariwisata dapat menimbulkan berbagai dampak, mencakup dimensi	Rahman, (2014)	Dampak yang ditimbulkan oleh pariwisata yaitu	1. Dampak Sosial 2. Dampak Ekonomi	1. Menghormati tokoh agama dan

No.	Sasaran	Kajian Literatur	Deskripsi Teori	Sumber	Sintesa Literatur	Variabel	/Indikator
			sosial, ekonomi, dan lingkungan		dampak sosial, ekonomi, dan lingkungan.	3. Dampak Lingkungan	menjalankan tradisi ziarah kubur
		Dampak Pengembangan Wisata	Pariwisata pada suatu daerah bertujuan adanya tujuan wisata yang mengacu pada perencanaan, pengembangan dan arah pengelolaan agar potensi yang dimiliki suatu daerah tersebut	(Fyka et. al., 2018).			2. Peningkatan pendapatan masyarakat
			Pariwisata sering dianggap sebagai mesin penggerak ekonomi. Pariwisata memiliki dampak negatif dan positif terhadap perekonomian. Dampak positif pariwisata terhadap perekonomian yaitu Kontribusi untuk pendapatan pemerintah, peluang lapangan kerja, pembangunan infrastruktur, pembangunan ekonomi lokal. Selain itu memiliki dampak negatif seperti ketergantungan	Spillane (1993)			3. Popularitas Makam Sapuro yang menjadi : daya tarik wisata religi dan kemacetan pada lingkungan sekitar makam sapuro.

No.	Sasaran	Kajian Literatur	Deskripsi Teori	Sumber	Sintesa Literatur	Variabel	/Indikator
			ekonomi dan karakteriistik musiman.				
2.	Identifikasi Kondisi Sarana dan Sebaran Fasilitas Sarana Prasarana Permukiman	Jenis Sarana dan Prasarana	sarana adalah fasilitas dalam lingkungan hunian yang berfungsi untuk mendukung penyelenggaraan dan pengembangan kehidupan sosial, budaya, dan ekonomi. Sarana permukiman terdiri dari sarana pemerintahan dan pelayanan umum, sarana pendidikan, sarana kesehatan, sarana peribadatan, sarana perdagangan dan niaga, serta ruang terbuka, taman, dan lapangan olahraga; prasarana adalah kelengkapan dasar fisik lingkungan hunian yang memenuhi standar pemenuhan tertentu untuk kebutuhan bertempat tinggal yang layak, sehat, aman, dan nyaman. Prasarana	Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011	sarana merupakan kelengkapan dasar fisik untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia dari suatu daerah atau wilayah yang dapat meningkatkan perekonomian. Sedangkan prasarana merupakan fasilitas umum yang menjadi penunjang utama terselenggaranya suatu proses atau kegiatan dalam kota, yang pada akhirnya akan menentukan perkembangan kota.	Sarana dan Prasarana Permukiman	Ketersediaan dan kondisi jenis sarana dan prasarana permukiman : 1. Sarana pemerintahan, 2. sarana pendidikan, 3. sarana kesehatan, 4. sarana peribadatan, 5. sarana perdagangan dan niaga, 6. Ruang terbuka, taman, dan lapangan olahraga. Prasarana permukiman terdiri dari 1. Jaringan jalan, 2. jaringan drainase, 3. jaringan air bersih, 4. jaringan air limbah/sanitasi, 5. Jaringan persampahan,

No.	Sasaran	Kajian Literatur	Deskripsi Teori	Sumber	Sintesa Literatur	Variabel	/Indikator
			permukiman terdiri dari jaringan jalan, jaringan drainase, jaringan air bersih, air limbah/sanitasi, persampahan, jaringan listrik, dan jaringan telepon				6. jaringan listrik, 7. jaringan telepon 8. jaringan transportasi lokal
3.	Menganalisis Kebutuhan Sarana dan Prasarana Metode Sni	Standar Kebutuhan Kuantitas sarana dan prasarana	Standar kebutuhan sarana dan prasarana permukiman menggunakan pedoman SNI 03-1733-2004 terkait tata cara perencanaan lingkungan perumahan di perkotaan. Sarana kebutuhan digunakan sebagai acuan penting dalam perencanaan lingkungan hunian yang bertujuan untuk menciptakan kualitas hidup yang baik bagi masyarakat.	SNI 03-1733-2004	Standar kebutuhan sarana dan prasarana permukiman menggunakan pedoman SNI 03-1733-2004 terkait tata cara perencanaan lingkungan perumahan di perkotaan. Sarana kebutuhan digunakan sebagai acuan penting dalam perencanaan lingkungan hunian yang bertujuan untuk menciptakan kualitas hidup yang baik bagi masyarakat. Faktor penentu kebutuhan sarana dan prasarana diantaranya pertumbuhan penduduk.	1. Proyeksi Jumlah Penduduk 2. Kuantitas sarana dan prasarana	1. Jumlah penduduk 2. Kebutuhan standar perjiwa 3. Jumlah sarana dan prasarana

Sumber : Hasil Analisis Penulis, 2025